

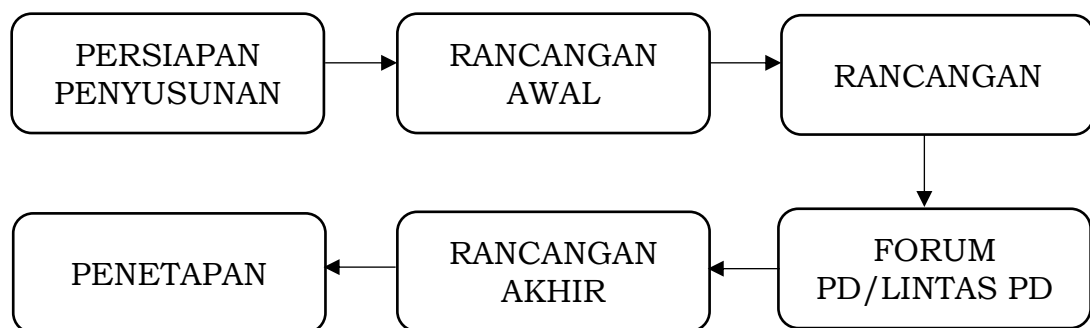
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Dalam rangka penyusunan Renja, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan. Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun dengan tahapan: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

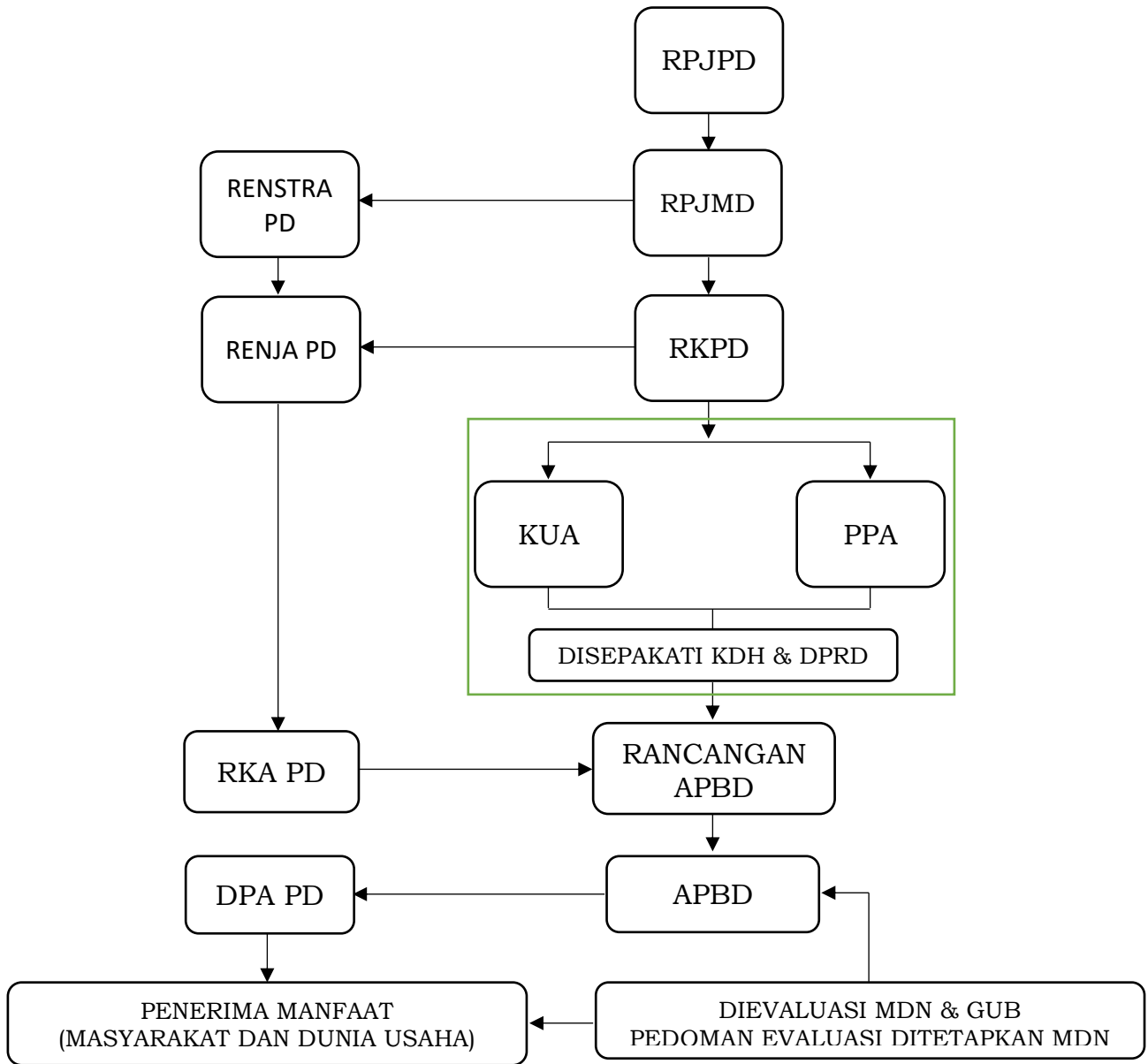


GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu (2018), dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2019). Berpedoman pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.



GAMBAR 1.2

Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD. Seluruh program selama lima tahun memedomani program prioritas dalam RPJMD. RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) ke dalam kegiatan prioritas. RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
27. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
39. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014;
40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
44. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
47. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
48. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
49. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
50. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dokumen Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan adalah dokumen yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

2. Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan tujuan:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
- b. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020;
- c. Menjabarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Anggaran yang dikelola Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2018 sebesar Rp 43.855.508.000,- dengan realisasi mencapai Rp 41.597.520.326,- atau 94,85% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 18.315.288.000,- dengan realisasi Rp 17.980.145.550,- atau 98,17%

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 25.540.220.000,- dengan realisasi Rp. 23.617.374.776,- atau 92,47%

Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA	KEBIJAKAN/ TINDAKAN UTK MENGATASI
NIHIL				

Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH		
	a. Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	Komitmen dari Pimpinan SKPD Provinsi Jawa Tengah	Target: Seluruh SKPD Capaian: 48 SKPD Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) telah dilakukan secara terus menerus oleh tiap SKPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
	b. Nilai Pembangunan Integritas	Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Target: B+ Capaian: B+ Mewujudkan sumber daya aparatur yang berintegritas dan netral
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional		

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA
	a. Tingkat Kapabilitas APIP	Komitmen dari Pimpinan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Target: Level 3 Capaian: Level 3 Dapat lebih mewujudkan peran APIP yang efektif baik dari sisi <i>quality assurance</i> maupun <i>consulting partner</i>
	b. Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional	Proses pemetaan pegawai telah dilakukan	Target: 100% Capaian: 100% Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang profesional dan berkompeten

Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

NO	PROGRAM	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI THD CAPAIAN PROGRAM RENSTRA
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH		
	a. Opini BPK (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen dari Pemerintah Kab/Kota Jawa Tengah • Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung akuntabilitas Pemerintah Kab/Kota 	Target: Provinsi dan 22 Kab/Kota Capaian: Provinsi dan 31 Kab/Kota Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
	b. Tingkat Maturitas SPIP	Komitmen dari Para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Target: Level 3 Capaian: Level 3,023 <ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat telah menetapkan, mengkomunikasikan, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian atas kegiatan pokok SKPD • Inspektorat telah melaksanakan pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik namun evaluasi atas pengendalian intern belum terdokumentasi dengan memadai

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra lebih detail dapat diketahui dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2017	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Prog.&Keg. Renja Thn 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2019				
						Target Renja Itprov Thn 2018	Realisasi Renja Itprov Thn 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2019	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
4	02													
4	02	01												
4	02	01	05	Pengawasan Inspektorat										
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Opini BPK (WTP)	Prov + 22 Kab/Kota	Prov + 30 Kab/Kota		Prov + 22 Kab/Kota	Prov + 31 Kab/Kota	134,78%	-	-	
					Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD		Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	100%	-	-	
					Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3,023		Level 3	Level 3,023	100,77%	Level 3,1	Level 3,023	97,51%
					Nilai Pembangunan Integritas	B+	B+		B+	B+	100%	-	-	-
4	02	01	06	Program Peningkatan Profesionalisme	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3		Level 3	Level 3	100%	Level 3 (DC 2 elemen)	Level 3 (DC 2 elemen)	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prog./Keg.	Indikator Kinerja Prog. (Outcomes)/Keg. (Output)	Target Kinerja Capaian Prog.Thn 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog.& Keluaran Keg. s/d Thn 2017	Target Indikator Lainnya	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Prog.&Keg. Renja Thn 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Itprov s/d Thn 2019	
						Target Renja Itprov Thn 2018	Realisasi Renja Itprov Thn 2018	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. & Keg. s/d Tahun 2019	Tk. Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional	100%	98%		100%	100%	100%	-	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Capaian kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat diketahui dari Tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2017	2018	2019	2020	
1	Opini BPK (WTP)	-	Opini BPK thd LapKeu Daerah, Temuan BPK RI yg di-TL	1 Prov + 16 Kab/Kota	1 Prov + 22 Kab/Kota	1 Prov + 30 Kab/Kota	1 Prov + 31 Kab/Kota	-	-	
2	Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	-	-	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	-	-	
3	Tingkat Maturitas SPIP	-	-	Level 3	Level 3	Level 3,023	Level 3,023	Level 3,1	Level 3,2	
4	Nilai Pembangunan Integritas	-	-	B+	B+	B+	B+	-	-	
5	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 DC (2 elemen)	Level 3 DC (1 elemen)	
6	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional	-	-	97%	100%	98%	100%	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Adanya interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks sehingga dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu di antaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu: Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Jawa Tengah.

Tabel 2.3
Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tugas: Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah provinsi; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas; 2. Penerapan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal pada lingkup SKPD Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya; 2. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan; 3. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal 4. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen dan dukungan dari KDH serta jajaran pimpinan 2. Sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> dalam mencapai target yang ditetapkan

Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya		

Visi Gubernur Jawa Tengah untuk periode Tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut, disusun 4 misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
- b. Mempercepat Reformasi Birokrasi yg dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sebagai upaya mewujudkan misi-misi di atas, disusunlah program-program kerja utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
- b. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- c. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi;
- d. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
- e. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- f. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- g. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- h. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- i. Rumah Sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- j. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah misi kedua, yaitu “Mempercepat Reformasi Birokrasi yang

dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota”. Selain itu secara tersirat, Inspektorat juga memiliki peran terhadap misi keempat, yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”, dalam konteks bahwa Inspektorat juga turut serta mewujudkan kualitas SDM APIP yang lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih profesional lagi ke depannya.

Sementara untuk Program Kerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah:

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK
 - a. Inspektorat sebagai fasilitator masuknya kurikulum yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada jenjang Pendidikan SMA/SMK
 - b. Inspektorat melaksanakan sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi melalui Inspektorat Goes To School dan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar melalui *Saber Goes To School* pada SMA/SMK se-Jawa Tengah sebagai pondasi awal Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Anti Pungli.

2. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi.

Secara sederhana, hal tersebut dapat dibaca sebagai Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada percepatan Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi saja, tetapi juga mendorong dan mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayahnya masing-masing.

3. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni
Inspektorat sebagai aparat pengawas berkontribusi terhadap proses pengentasan desa miskin, yaitu Desa Turirejo Kabupaten Demak.

Maka selanjutnya penetapan tujuan dan sasaran nantinya harus mengacu pada misi dan program kerja yang sesuai.

Tabel 2.4

Tabel Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Sistem/ Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem pelaporan dan tindak lanjut terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan) 3. Penerapan E-Audit dalam proses pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemeriksaan yang masih rendah ditandai dengan produktivitas hasil pengawasan dan keterlambatan penerbitan LHP; 2. Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan.
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik 2. Adanya Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) yang melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentuterhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 3. Adanya kerjasama yang baik antara Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dengan stakeholder terkait 	Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.
Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawas yang dimiliki dilihat dari tingkat	1. Terbatasnya kuantitas tenaga Pengawas (PFA dan P2UPD)

Aspek	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
	pendidikan formal dan penjenjangan auditor sangat tinggi	2. Masih adanya perilaku tenaga pemeriksa yang belum mencerminkan kode etik dan norma audit yang berlaku. 3. Belum ada APIP bersertifikat nasional/internasional
Sumber Daya Anggaran	Anggaran yang terus meningkat menandakan komitmen dan keseriusan Kepala Daerah dalam penguatan pengawasan	Terbatasnya dukungan anggaran operasional untuk prasarana pemeriksaan
Lingkungan Strategis	1. Dukungan Kepala Daerah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dalam penguatan peran Inspektorat 2. Keberadaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka kegiatan pengawasan	Kurangnya komunikasi kepada <i>stakeholder</i> terkait (LSM, Akademisi, masyarakat)

Tabel 2.5
Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
Sistem/kebijakan	1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar	1. Keinginan dari <i>stakeholders</i> bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan di Unit Kerjanya; 2. Upaya mempertahankan opini BPK "Wajar

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
	<p>Akuntansi Pemerintah (SAP)</p> <p>2. Terbitnya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 membuka peluang penguatan peran Inspektorat</p> <p>3. Isu eselonering dan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengakibatkan penguatan posisi APIP dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga dapat bekerja secara profesional dan tanpa adanya intervensi lokal</p>	<p>Tanpa Pengecualian", Inspektorat perlu berperan lebih optimal dalam melaksanakan tugas Reviu atas Laporan Keuangan</p> <p>3. Isu eselonering dan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengakibatkan meningkatnya kebutuhan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas</p>
Kelembagaan	Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai <i>consulting partner</i> bagi SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	<p>1. Pola Pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri belum jelas</p> <p>2. Inspektorat memiliki banyak "atasan" di tingkat pusat</p>
Sumber Daya Manusia	Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan karir dan kompetensi terbuka luas	Penentuan formasi dan kebutuhan tenaga pemeriksa tergantung dari kebijakan

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
		Pemerintah Provinsi (Badan Kepegawaian Daerah)
Lingkungan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan mitra seperti BPK dan BPKP atas hasil pengawasan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Dukungan KPK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi 3. Adanya aduan masyarakat tentang KKN kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kepercayaan dari LSM maupun elemen masyarakat terhadap eksistensi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, karena dianggap tidak mampu menemukan penyimpangan-penyimpangan keuangan Negara/ Daerah 2. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 3. Tuntutan SKPD terhadap peran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai penjamin mutu 4. Semakin bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum 5. Semakin bertambahnya temuan hasil pemeriksaan BPK yang berkembang ke ranah hukum

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Jawa Tengah 2018-2023.

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat	Jawa Tengah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100%	13.500.000	Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat	Jawa Tengah	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100%	14.004.110	
			Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	100%				Persentase Pemantauan Hasil Pemeriksaan	100%		
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	100%				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasannya lainnya	100%		
a	Audit Kinerja	Jawa Tengah	Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan	36 laporan	2.715.302	Audit Kinerja	Jawa Tengah	Jumlah LHA Kinerja yang dihasilkan	45 laporan	3.512.648	
b	Audit dengan tujuan tertentu	Jawa Tengah	Jumlah LHADTT yang dihasilkan	114 laporan	5.965.546	Audit dengan tujuan tertentu	Jawa Tengah	Jumlah LHADTT yang dihasilkan	74 laporan	3.512.614	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
c	Evaluasi kinerja	Jawa Tengah	Jumlah LHE yang dihasilkan	84 laporan	2.029.430	Evaluasi kinerja	Jawa Tengah	Jumlah LHE yang dihasilkan	101 laporan	2.929.685	
d	Reviu Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jawa Tengah	Jumlah LHR yang dihasilkan	101 laporan	603.318	Reviu Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	Jawa Tengah	Jumlah LHR yang dihasilkan	40 laporan	1.065.986	
e	Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah Hasil Pemeriksaan	Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Monitoring yang dihasilkan	83 laporan	1.808.099	Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah Hasil Pemeriksaan	Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Monitoring yang dihasilkan	84 laporan	1.726.962	
f	Pengawasan lainnya	Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan	12 laporan	378.305	Pengawasan lainnya	Jawa Tengah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan	49 laporan	1.256.215	
2	Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP	Jawa Tengah dan Jakarta	Persentase APIP yang berlisensi nasional/ internasional	40%	350.000	Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP	Jawa Tengah dan Jakarta	Persentase APIP yang berlisensi nasional/ internasional	40%	350.000	
	Sertifikasi APIP	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional	2 orang	350.000	Sertifikasi APIP	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional	2 orang	350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
3	Program Peningkatan Manajemen Mutu	Jawa Tengah dan Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,35	1.543.253	Program Peningkatan Manajemen Mutu	Jawa Tengah dan Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,35	1.550.000	
a	PKPT Berbasis Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen PKPT Berbasis Risiko	1 dokumen	1.245.730	PKPT Berbasis Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen PKPT Berbasis Risiko	1 dokumen	1.252.477	
b	Surveillance ISO	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen Surveillance ISO	1 dokumen	297.523	Surveillance ISO	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen Surveillance ISO	1 dokumen	297.523	
4	Program Manajemen Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Persentase OPD yang memiliki Profil manajemen risiko	100%	1.449.490	Program Manajemen Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Persentase OPD yang memiliki Profil manajemen risiko	100%	1.616.057	
a	Kegiatan Pemetaan Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah dokumen Peta Risiko OPD	48 dokumen	619.715	Kegiatan Pemetaan Risiko	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah dokumen Peta Risiko OPD	48 dokumen	631.746	
b	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jawa Tengah dan Jakarta	Pemetaan Kegiatan Saber Pungli	35 dokumen	829.775	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	Jawa Tengah dan Jakarta	Pemetaan Kegiatan Saber Pungli	35 dokumen	984.311	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
5	Program Pembangunan Budaya Integritas	Jawa Tengah dan Jakarta	Nilai Budaya Integritas	80	2.200.000	Program Pembangunan Budaya Integritas	Jawa Tengah dan Jakarta	Nilai Budaya Integritas	80	2.200.000	
	Kegiatan Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan	2.200.000	Kegiatan Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jawa Tengah dan Jakarta	Dokumen Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 laporan	2.200.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0004304 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah wajib melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersama pemangku kepentingan. Forum Penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2019 dan memperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat				
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengawasan Lainnya 	Semarang	Jumlah laporan hasil pengawasan lainnya yang dihasilkan	12 Laporan	Menyelenggarakan fungsi <i>Consulting Partner</i> bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah, seperti pemanfaatan teknologi sebagai transparansi dan akuntabilitas dengan cara Inspektorat dapat mengakses Lapo Gub dan Wadul Dewan → DPRD
	<ul style="list-style-type: none"> Reviu Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan 	Jawa Tengah	Jumlah LHR yang dihasilkan	101 laporan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melaksanakan Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) → Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> Audit dengan Tujuan Tertentu 	Jawa Tengah	Jumlah LHADTT yang dihasilkan	114 laporan	<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan melaksanakan audit

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
					asset dan sinkronisasi asset → DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Dana Desa agar menggunakan Siskeudes dan e-Audit agar dapat terintegrasi dengan sistem elektronik yang lain yang digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah → BPKP
2	Program Manajemen Risiko		Persentase OPD yang memiliki Profil manajemen risiko	100%	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mendorong/memfasilitasi penyusunan RTP SKPD, penilaian risiko, dan hal lain yang berkaitan dengan 25 sub unsur SPIP → BPKP
	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemetaan Risiko 	Jawa Tengah dan Jakarta	Jumlah dokumen Peta Risiko OPD	48 dokumen	Pada tahun 2016 QA yang dilakukan BPKP terhadap maturitas SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara manual. Mulai tahun 2018, penilaian maturitas SPIP menggunakan e-SPIP secara <i>self assessment</i> yang kemudian di validasi oleh BPKP. Risiko: level maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi turun karena ada penilaian ulang secara e-SPIP → Perwakilan BPKP Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
3	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 	Semarang	Tersedianya ruang konsultasi	1 Ruang	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat membuka ruang konsultasi dan pengaduan yang representatif → DPRD
4	Pengentasan satu desa miskin untuk satu SKPD	Jawa Tengah	-	-	Pengentasan desa miskin dengan kriteria: desa tidak memiliki potensi dan fasilitas desa memadai, perumahan dan lingkungan kumuh, serta keadaan penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan → TGUPP

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati dirisebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dansejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangkamenengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu agenda ke-2 dan ke-4:

2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

Implementasi agenda prioritas pembangunan nasional ke-dua dan ke-empat tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2019 ke-tujuh, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada:

1. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan

- perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan Perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN
2. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan

1.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2020 adalah: “Terciptanya Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya Level 3 Dengan Catatan (1 elemen) Kapabilitas APIP
2. Tercapainya Nilai 3,2 Maturitas SPIP

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Level 3 penuh Kapabilitas APIP	3
			Nilai 3,5 Maturitas SPIP	3.2
		Tercapainya level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level 3 Penuh Kapabilitas APIP 1. "Peran dan Layanan" 2. "Praktik Profesional" 3. "Struktur Tata Kelola"	3
		Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Nilai 3,5 pada unsur : 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern	3.2
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	87.3
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	87.3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.		Target	Rp. (000)		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	NON URUSAN																	
0.00	NON URUSAN																	
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100					12.367.457.000		11.869.132		Inspektorat
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah									Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	3 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	100.0%	240.000.000	3 Laporan	300.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM -

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Satuan	Volume		Satuan	Volume										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
												keuangan perangkat daerah							SEKRETARIAT
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00%	114.180.000	12 Bulan	135.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT	
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00%	1.000.000.000	12 Bulan	1.050.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT	
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum,	100.00%	185.000.000	12 Bulan	194.250	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										barang milik daerah		kepegawaian dan keuangan perangkat daerah						UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah									Jumlah bulannya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.%	2.059.437.000	12 Bulan	2.235.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah									Jumlah bulannya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.%	800.000.000	12 Bulan	840.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah									Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00%	400.000.000	12 Bulan	420.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah									Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00%	20.000.000	12 Bulan	21.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.009	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan									Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100.00%	2.610.840.000	12 Bulan	2.741.382	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM -

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Dinas/Operasional Perangkat Daerah									Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah		perangkat daerah						SEKRETARIAT
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah									Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.00%	550.000.000	12 Bulan	650.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor									Jumlah unit penyediaan sarana	78 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan	100.00%	1.200.000.000	195 Unit	1.200.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										dan prasarana kantor perangkat daerah		umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah						DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.012	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah									Jumlah Unit Gedung yang direhab	1 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.0%	200.000.000	1 Unit	210.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional									Jumlah unit Kendaraan Dinas yang diadakan	5 Unit	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.0%	1.400.000.000	1 Unit	350.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal									Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Wo	295 Orang	Persentase ketercapaian pelayanan	100.0%	988.000.000	250 Orang	892.500	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja	
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)				
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target			
					Satuan	Volume		Satuan	Volume										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
										rkshop/Bintek/Seminar		umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah							DAN UMUM - SEKRETARIAT
0.00.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah									Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	1 Laporan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.0%	400.000.000	1 Laporan	420.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT	
0.00.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah									Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100.0%	200.000.000	12 Bulan	210.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT	
0.00.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													209.470.000		194.250		Inspektoralat	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penganggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0.00.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00%	113.680.000	4 Dokumen	95.000	OPD Provinsi	SUB BAGIAN PERENCANAAN - SEKRETARIAT
0.00.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100.00%	95.790.000	6 Dokumen	99.250	OPD Provinsi	SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN - SEKRETARIAT
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.05	PENGAWASAN																	
4.05.15	Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 sebanyak	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3	Kapabilitas APIP	level	3	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan, Persentase obyek	persen	100					14.004.110.000		14.928.750	Inspektorat	

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		k 85% KLOP					pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya, Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan											
4.05.15.001	Audit Kinerja									Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II	15 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	100.%	1.158.541.000	10 Laporan	1.100.000	Irban wil II	-
4.05.15.001	Audit Kinerja									Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III	15 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	100.%	1.161.876.000	10 Laporan	1.100.000	Irban wil III	-
4.05.15.001	Audit Kinerja									Jumlah Laporan Hasil Audit yang	15 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan	100.%	1.192.231.000	10 Laporan	1.100.000	Irban wil I	-

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										dihasilkan wilayah I		pengawasan wilayah I						
4.05.15.002	Evaluasi Kinerja									Jumlah LHE yang dihasilkan	101 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100.%	2.929.685.000	84 Laporan	2.300.000	Irbansus	-
4.05.15.003	Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan									Jumlah LHR yang dihasilkan	40 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100.%	1.065.986.000	101 Laporan	800.000	Irbansus	-
4.05.15.004	Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan									Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektoralat Provinsi/BPK/Kementerian/Lembaga	84 Laporan			1.726.962.000	84 Laporan	1.800.000	Inspektoralat	-

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.05.15.005	Audit Dengan Tujuan Tertentu									Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II	14 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah II	100.00%	1.017.016.000	26 Laporan	1.000.000	Irbanswil II	-
4.05.15.005	Audit Dengan Tujuan Tertentu									Jumlah Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I	14 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah I	100.00%	935.446.000	26 Laporan	1.000.000	Irbanswil I;	-
4.05.15.005	Audit Dengan Tujuan Tertentu									Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu	34 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan	100.00%	827.536.000	36 Laporan	1.550.000	Irbanswil;	-

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										yang dihasilkan								
4.05.15.005	Audit Dengan Tujuan Tertentu									Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III	12 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah III	100.00%	732.616.000	26 Laporan	1.100.000	Irbanswil III;	-
4.05.15.006	Pengawasan Lainnya									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan	12 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya	100.00%	409.150.000	3 Laporan	178.750	Irbanswil III;	-
4.05.15.006	Pengawasan Lainnya									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah I	12 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah I	100.00%	295.996.000	3 Laporan	500.000	Irbanswil I	-

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.05.15.006	Pengawasan Lainnya									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah III	13 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	100.0%	310.499.000	3 Laporan	400.000	Urban wil III	-
4.05.15.006	Pengawasan Lainnya									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II	12 Laporan	Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	100.0%	240.570.000	3 Laporan	500.000	Urban wil II	-
4.05.18	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3	Kapabilitas APIP	level	3	Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	persen	40					350.000.000		367.500		Inspektorat
4.05.18.001	Sertifikasi APIP									Jumlah APIP yang berlisensi nasional/	2 Orang	Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	40.0%	350.000.000	2 Orang	367.500	Inspektorat	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										internasional								UMUM - SEKRETARIAT
4.05.20	Pembangunan Budaya Integritas	Level Maturitas SPIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP	Level Maturitas SPIP harus mencapai level 3,5	Maturitas SPIP	level	3,5	Nilai Budaya Integritas	%	80					2.210.000.000		2.310.000		Inspektorat
4.05.20.001	Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 Laporan	Nilai Budaya Integritas	80.0%	2.210.000.000	1 Laporan	2.310.000	Inspektorat	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM - SEKRETARIAT
4.05.21	Peningkatan Manajemen Mutu	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3 sebanyak	Level Kapabilitas APIP harus mencapai level 3	Kapabilitas APIP	level	3	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Angka	87.35.					1.550.000.000		1.627.500		Inspektorat

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)		
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		k 85% KLOP																
4.05.21.001	PPKT Berbasis Risiko									Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	87.35. Angka	1.252.477.000	1 Dokumen	1.365.000	Inspektorat	SUB BAGIAN PERENCANAAN - SEKRETARIAT
4.05.21.002	Surveillance ISO									Jumlah Dokumen Surveillance ISO	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	87.35. Angka	297.523.000	1 Dokumen	262.500	Inspektorat	SUB BAGIAN PERENCANAAN - SEKRETARIAT
4.05.22	Program Manajemen Resiko	Level Maturitas SPIP harus mencapai level 3 sebanyak 85% KLOP	Level Maturitas SPIP harus mencapai level 3,5	Maturitas SPIP	level	3,5	Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	100					1.616.057.000		1.575.000	Inspektorat	
4.05.22.001	Pemetaan Risiko									Jumlah dokumen peta risiko	48 Dokumen	Persentase OPD yang memiliki profil	100.%	631.746.000	48 Dokumen	630.000	Inspektorat	SUB BAGIAN PERENCANAAN -

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemb. Nasional	Prioritas Pemb Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja							Pagu Indikatif Tahun 2020	Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target		Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp.	Target	Rp. (000)			
							Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur				Target		
					Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
										Perangkat Daerah		manajemen risiko						SEKRETARIAT
4.05.22.002	Sapu bersih pungutan liar									Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli	35 Dokumen	Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	100.0%	984.311.000	35 Dokumen	945.000	Inspektorat	SUB BAGIAN PERENCANAAN - SEKRETARIAT
Total													32.307.094.000		32.872.132			

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang berisi penjabaran tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh stakeholder terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh SKPD pada pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, Renja ini juga menjadi acuan dalam upaya pengawasan yang pada akhirnya dapat mewujudkan penguatan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar penguatan pengawasan dan perubahan peran Inspektorat menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* dapat terlaksana secara optimal.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan pengawasan secara terpadu yang terangkum dalam Renja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Tengah terpilih periode 2018 – 2023, khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Semarang, Agustus 2019

INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si, CA

Pembina Utama Madya

NIP. 19611226 198303 1 001